

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN
PENDAPATAN DARI LABA PERUSAHAAN DAERAH
TERHADAP BELANJA MODAL PADA KOTA PEKALONGAN
PERIODE 2010-2019**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh:

ALSYA IKA AMEILIA

NIM. 4317048

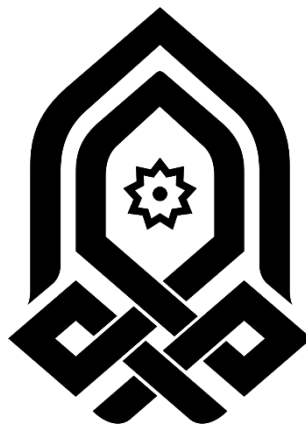
**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

2021

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN
PENDAPATAN DARI LABA PERUSAHAAN DAERAH
TERHADAP BELANJA MODAL PADA KOTA PEKALONGAN
PERIODE 2010-2019**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh:

ALSYA IKA AMEILIA

NIM. 4317048

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Alsya Ika Ameilia**

NIM : **4317048**

Judul Skripsi : **Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kota Pekalongan Periode 2010-2019**

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Juni 2021

Yang Menyatakan,



Alsya Ika Ameilia

NOTA PEMBIMBING

Tsalis Syaifuddin, S.Pd.M.Si

Plalangan RT 05 RW 01 Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Alsya Ika Ameilia

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : **Alsya Ika Ameilia**

NIM : **4317048**

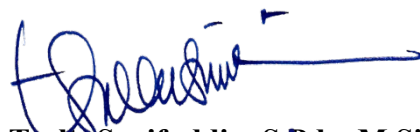
Judul Skripsi : **Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kota Pekalongan Periode 2010-2019**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 17 Juni 2021

Dosen Pembimbing



Tsalis Syaifuddin, S.Pd. , M.Si

NIP. 19870803018011002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Pahlawan, Rowolaku, Kajen, Kabupaten Pekalongan
Website: febi.iainpekalongan.ac.id email: febi@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

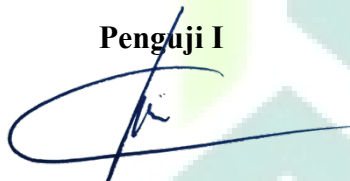
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **Alsya Ika Ameilia**
NIM : **4317048**
Judul Skripsi : **Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kota Pekalongan Periode 2010-2019**

Telah diujikan pada hari Selasa, 10 Agustus 2021 – Rabu, 11 Agustus 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun).

Dewan Penguji

Penguji I


M. Aris Safi'i, M.E.I
NIP. 198510122015031004

Penguji II


Ria Annisatus Sholihah, S.E. M.S.A.CA
NIP. 198706302018012001

Pekalongan, 31 Agustus 2021

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Hj. Sinta Dewi Rismawati, SH., M. H.
NIP. 197502201999032001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fenom-fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El

م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ إ = ai	إي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/.

Contoh:

مرأة ج م يلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	ditulis	<i>rabbānā</i>
البر	ditulis	<i>al-birr</i>

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>as-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدع	ditulis	<i>al-badī'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

ABSTRAK

ALSYA IKA AMEILIA. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kota Pekalongan Periode 2010-2019.

PAD dihasilkan melalui pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Perolehan PAD bersifat variatif, namun disisi lain Pemda membutuhkan alokasi yang besar terkait belanja modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Tujuan penelitian ini untuk membuktikan hubungan pengaruh antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Pekalongan selama tahun 2010-2019.

Penelitian ini termasuk dalam jenis kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota Pekalongan . Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD selama tahun 2010-2019 yang diolah dengan bantuan SPSS. Uji prasyarat analisis berupa uji asumsi klasik, sedangkan untuk uji hipotesisnya dilaksanakan dengan regresi linear berganda.

Hasil analisis yang diperoleh menyimpulkan bahwa Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2), dan Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (X_3) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal (Y) di Kota Pekalongan. Sedangkan secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah, Belanja Modal.

ABSTRACT

ALSYA IKA AMEILIA. The Effect of Local Taxes, Retribution, and Revenue of Provincially Owned Corporation to the Capital Expenditures in Pekalongan City During The Years 2010-2019.

PAD is generated through local taxes, retribution, revenue of provincially owned corporation, and other legitimate local revenue. PAD revenue is varied, but the local government requires a large allocation of capital expenditures in order to increase the economic growth. The aims of this research are to know about interconnections between Local Taxes, Retribution, and Revenue of Provincially Owned Corporation to the Capital Expenditures in Pekalongan City during the years 2010-2019.

This research is a quantitative with the technique of collecting data using documentation method. Data used comes from budget out comes years 2010-2019. The test of prerequisite analysis using classical assumption test. Then the hypothesis test using multiple linear regression analysis.

The result showed that Local Taxes, Retribution, and Revenue of Provincially Owned Corporation have negative effect to the Capital Expenditures in Pekalongan City. However, simultaneously have positive effect to the Capital Expenditures in Pekalongan City.

Keyword : Local Taxes, Retribution, Revenue of Provincially Owned Corporation, Capital Expenditures

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN PEKALONGAN
2. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, SH., MH selaku Dekan FEBI IAIN Pekalongan
3. Dr. H. Tamamudin, S.E.MM selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI IAIN Pekalongan
4. Ade Gunawan, M.M selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah FEBI IAIN Pekalongan
5. Ria Anisatus Sholihah, S.E., Ak., MSA, CA selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah FEBI IAIN Pekalongan
6. Tsalis Syaifuddin, S.Pd., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. H. Muhammad Nasrullah, M.S.I selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)
8. Ria Annisatus Sholihah, S.E. M.S.A, CA dan M. Aris Safi'i, M.E.I selaku dosen penguji.

9. Pihak BKD Kota Pekalongan yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang saya perlukan
10. Orang tua dan keluarga saya yang tanpa lelah selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik bagi saya
11. Para sahabat atas rangkulan, kenangan, dan dukungan hingga saya mampu berjuang melewati segala fase selama perkuliahan
12. Pihak – pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-satu oleh penulis
13. *Last but not least, dear myself, thank you for being your own hero, for fighting, surviving, and growing even when I don't want to. I am sorry, I blame you for things you can't control. But at the end of the day, its okay that you're not perfect, I will love you anyway.*

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 17 Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	12
a. Pajak Daerah.....	14
b. Retribusi Daerah.....	17
c. Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah.....	21
d. Lain-lain PAD yang Sah.....	21
2. Belanja Modal.....	22
B. Telaah Pustaka.....	25
C. Kerangka Berfikir.....	32

D.	Hipotesis	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		35
A.	Jenis Penelitian	35
B.	Pendekatan Penelitian	35
C.	Setting Penelitian	35
D.	Populasi dan Sampel	36
E.	Definisi Operasional	37
F.	Teknik Pengumpulan Data	37
G.	Metode Analisis Data	37
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		42
A.	Data Umum	42
B.	Data Khusus	43
C.	Analisis Data	45
1.	Uji Asumsi Klasik	45
a.	Uji Normalitas	45
b.	Uji Multikolinearitas	47
c.	Uji Autokorelasi	49
2.	Uji Hipotesis (Regresi Linear Berganda)	49
a.	Uji T	50
b.	Uji F	53
c.	Uji Koefisien Determinasi	55
D.	Pembahasan	56
1.	Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kota Pekalongan Tahun 2010-2019	56
2.	Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kota Pekalongan Tahun 2010-2019	58
3.	Pengaruh Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kota Pekalongan Tahun 2010-2019	59

4. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah Secara Simultan Terhadap Belanja Modal Pada Kota Pekalongan Tahun 2010-2019	60
BAB V PENUTUP.....	62
A. Simpulan	62
B. Keterbatasan Penelitian.....	63
C. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN I.....	I
LAMPIRAN II	II
LAMPIRAN III.....	III
LAMPIRAN IV	IV
LAMPIRAN V	V

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbedaan Pajak dan Retribusi, 20
Tabel 3.1	Kriteria keputusan uji autokorelasi, 39
Tabel 4.1	Hasil olah uji statistik deskriptif, 43
Tabel 4.2	Hasil olah uji normalitas, 46
Tabel 4.3	Hasil olah uji multikolinearitas, 47
Tabel 4.4	Hasil olah uji autokorelasi, 49
Tabel 4.5	Hasil olah uji T, 51
Tabel 4.6	Hasil olah uji F, 54
Tabel 4.7	Hasil olah uji koefisien determinasi, 55

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Grafik perolehan PAD dan pengeluaran Belanja Modal di
Kota Pekalongan selama tahun 2010-2019, 6

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba Perusahaan Daerah selama 2010-2019, I
- Lampiran 2 Uji Asumsi Klasik, II
- Lampiran 3 Uji Hipotesis Regresi Linear Berganda, V
- Lampiran 4 Surat Validasi Data, VII
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup, VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkup akuntansi sektor publik mencakup perencanaan secara makroekonomi, mobilisasi terkait pendapatan, penganggaran dana, dan realisasi anggaran, serta audit yang dijelaskan berdasarkan sudut pandang akuntansi (Prof. Indra Bastian, 2019). Output yang ingin dicapai organisasi publik adalah keberhasilan dalam pelayanan publik, penyediaan infrastruktur dan alokasi dana publik. Dalam kaitannya akuntansi keuangan daerah, maka konsep dan praktik di Indonesia dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan terkait otonomi daerah.

Munculnya kebijakan mengenai otonomi daerah merupakan salah satu akibat dari adanya krisis moneter pada tahun 1997. Sejak saat itu, gerakan reformasi nasional menginginkan pembaharuan terhadap sistem pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi. Hal ini yang mendesak pemerintah agar memberikan sebagian wewenang, hak, serta kewajiban pengelolaan keuangan kepada daerah otonom guna meminimalisir ketidakmandirian pemerintah daerah terhadap pusat yang sangat besar pada saat itu (Suparyanto, 2019). Satu diantara kewenangan yang dipasrahkan pemerintah pusat kepada daerah otonom adalah terkait sudut pandang pengelolaan keuangan. Dalam UU No.12 Tahun 2008 dijelaskan perihal setiap daerah otonom memiliki kewenangan yang luas, mandiri, dan bertanggungjawab untuk menunaikan kewajiban dalam membiayai

pemerintahannya, serta untuk mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan dengan mengelola potensi kekayaan alam di daerah tersebut. Terkecuali terkait wewenang dalam lingkup keamanan, pertahanan, fiskal, moneter, kebijakan luar negeri, peradilan, serta agama.

Penerimaan dan pengeluaran Negara termuat dalam APBN secara sistematis dan detail yang dicatat berdasarkan satu tahun anggaran. Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara adalah instrumen guna mengelola pendapatan dan pengeluaran negara dalam skema pemerintahan dan pembangunan nasional demi terwujudnya stabilitas ekonomi negara. (Santosa, 2008) Pengeluaran Negara dapat diartikan sebagai kegiatan Belanja Negara yang dilakukan untuk tujuan keberhasilan pembangunan nasional, contohnya seperti perbaikan infrastruktur dan konektivitas, meminimalisir tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta pemerataan dalam pembangunan nasional secara efektif dan efisien (Kusuma *et al.*, 2019).

Terdapat 2 jenis pengeluaran negara yakni pengeluaran rutin dan pembangunan. Pengeluaran rutin mencakup aktivitas belanja pegawai, barang, pembayaran utang dan bunga, dana subsidi kepada daerah otonom, dan pengeluaran lainnya. Sedangkan pengeluaran pembangunan yaitu seluruh belanja negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Contohnya seperti (1) Anggaran pembangunan departemen / lembaga negara (2) Anggaran guna pembangunan Dati I dan II; (3) Pengeluaran untuk pembangunan lain-lain. Belanja Negara ini kemudian akan dialokasikan dalam bentuk Belanja

Kementerian/Lembaga, Belanja Non-Kementerian/Lembaga, dan Transfer dari Pusat ke Daerah serta Dana Desa.

Dalam organisasi sektor publik, isu yang paling umum terjadi adalah terkait pengalokasian dana (anggaran). Alokasi dana adalah total pendistribusian anggaran yang terpakai dalam setiap program kerja. Pengalokasian dana apabila dilihat dari prespektif syariah maka dapat disandarkan pada konsep *Baitulmaal* yang disebut sebagai *Balance Budget*, maknanya adalah keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Maka pemda dituntut mampu mengelola dan mengalokasikan penerimaan baik yang berasal dari transfer dana pusat ataupun dari perolehan hasil sumber daya daerah yang terbatas untuk kepentingan belanja daerah secara produktif. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya yang member pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa [4]:59)

Oleh karenanya, pengeluaran daerah (belanja daerah) perlu dialokasikan sesuai skala prioritas secara adil, transparan, dan akuntabel agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati fasilitas secara optimal tanpa diskriminasi.

Dimana yang menjadi sumber pendanaan daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah, dana perimbangan, serta PAD lain-lain yang sah (Kawedar, Rohman, & Handayani, 2008).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.25 Tahun 2009, pendistribusian anggaran wajib dilaksanakan dengan efisien dan efektif, sebab tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat dinilai dari manajemen keuangan dalam belanja daerahnya. Belanja daerah dipisahkan menjadi Belanja Modal dan Belanja Operasi (Mahmudi, 2010). Belanja Operasi merupakan pengeluaran (belanja) guna membiayai aktivitas non investasi dengan manfaat kurang dari 1 tahun. Sementara itu, Belanja modal adalah pengeluaran untuk aset daerah dengan manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun yang dipergunakan dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas public, serta membutuhkan anggaran rutin guna biaya pemeliharaan dan operasional (Halim, 2014).

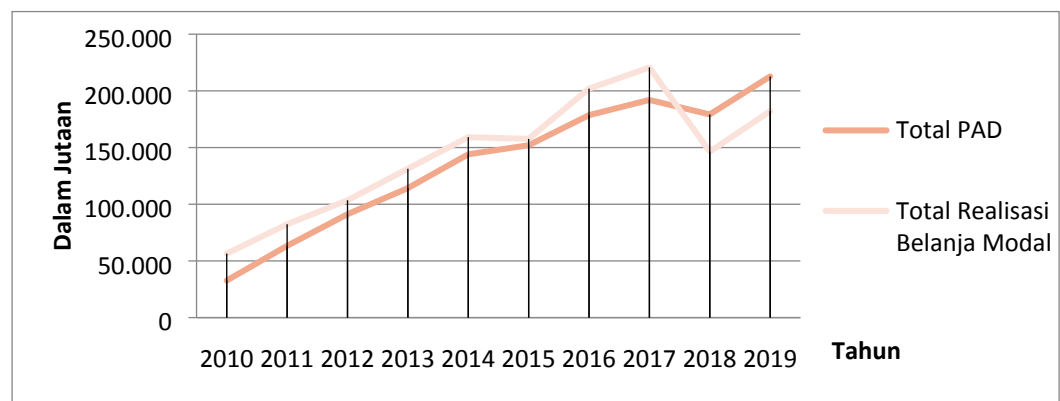
Klasifikasi belanja modal yaitu (1) Tanah; (2) Gedung dan bangunan; (3) Peralatan dan mesin; (4) Jalan, irigasi dan jaringan; serta (5) Belanja modal fisik lainnya (Kemenkeu, 2011). Pengalokasian belanja modal diselaraskan berdasarkan kepentingan tiap-tiap daerah terhadap prasarana dan sarana demi kepentingan aktualisasi program kerja pemerintahan ataupun pelayanan publik. Alokasi dana APBD terkait belanja modal adalah bentuk anggaran dari Pemda untuk kepentingan penambahan aset tetap seperti infrastruktur, bangunan, peralatan, serta aset tetap lainnya.

Pendapatan Asli Daerah menjadi satu diantara penyokong pendanaan bagi daerah yang dihasilkan melalui pajak daerah, retribusi daerah, perolehan atas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Namun perolehan PAD pada setiap daerah itu bervariasi, sebab dipengaruhi oleh perbedaan jumlah penduduk, keadaan geografis dan kemampuan masyarakatnya. PAD menjadi indikator penting untuk mengukur apakah pelaksanaan otonomi suatu daerah telah berhasil atau tidak, sebab semakin besar PAD yang diperoleh maka mencerminkan menurunnya tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat.

Persoalan yang kerap dihadapi daerah otonom yakni perihal pengelolaan sektor pajak daerah dan retribusi daerah dinilai kurang berkontribusi secara substansial terhadap perolehan daerah dalam skala komprehensif (Hartiningsih and Halim, 2015). Terbatasnya lingkup Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seringkali melahirkan alasan faktor kecilnya perolehan PAD. Sedangkan untuk mempertinggi pertumbuhan ekonomi daerah, Pemda membutuhkan alokasi yang lebih besar terkait belanja modal untuk pemenuhan prasarana yang semakin baik, agar mampu menyediakan manfaat dengan kurun waktu yang panjang guna meningkatkan proses pertumbuhan ekonomi serta memajukan sektor investasi di daerah bersangkutan.

Batas rata-rata nasional untuk penyerapan belanja dalam APBD di tingkat Provinsi yakni 44,74%, sedangkan untuk Kabupaten/Kota adalah 48,86%. Pengawasan terhadap penyerapan anggaran daerah sangat diperlukan untuk mengamati perputaran dana di daerah. Terutama terkait belanja modal,

belanja barang, dan belanja bansos agar dapat memperbaiki tingkat konsumsi masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah. Menurut Mendagri pada Agustus 2020, presentase realisasi belanja atau APBD Kota Pekalongan telah baik karena sudah mencapai di atas rata-rata nasional (48,86%) yakni sebesar 57,11%.



*berdasarkan LKPD Kota Pekalongan. (gambar 1)

Dilihat pada tahun 2015, PAD Kota Pekalongan mengalami kenaikan, namun total Belanja Modalnya justru mengalami penurunan. Disisi lain Pendapatan Asli Daerah mencapai jumlah tertinggi pada tahun 2019 yang meningkat hingga 18,7% dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, total Belanja Modal pada tahun tersebut justru lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2016 dengan jumlah PAD yang lebih sedikit. Pada umumnya perolehan PAD yang meningkat memunculkan asumsi bahwa alokasi belanja modal juga akan turut meningkat, sehingga nantinya dapat berdampak pada perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik.

Fakta di atas tampaknya tidak relevan dengan penelitian Nurzen dan Riharjo (2016) bahwa PAD berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sesuai penelitian tersebut, harusnya seiring dengan

meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan maka semakin tinggi pula Belanja Modal yang digelontorkan pemerintah daerah (Nurzen and Riharjo, 2016). Sebab Pendapatan Asli daerah adalah satu diantara sumber pembelanjaan daerah, apabila PAD bertambah maka pendapatan daerah juga turut bertambah. Selanjutnya jika pendapatan tersebut dialokasikan untuk menambah proporsi belanja modal, maka Pemda dapat menggali lebih dalam potensi-potensi kekayaan daerahnya untuk pembangunan daerah yang lebih maju.

Berdasarkan rasio Belanja Modal pada Total Belanja Daerah selama tahun 2010-2019, rata-rata hanya 19,08% yang terpakai untuk alokasi Belanja Modal. Artinya Pemerintah Daerah Kota Pekalongan lebih banyak mendistribusikan pendapatan yang diperoleh demi membiayai Belanja Operasi ataupun Belanja Rutin dibandingkan Belanja Modal. Padahal seperti pernyataan sebelumnya, belanja modal diharapkan mampu memperbesar keinginan investor agar berinvestasi pada daerah tersebut. Ketika sektor investasi meningkat maka PAD juga akan bertambah, sehingga mampu meminimalisir ketidakmandirian pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan kondisi ini kedepannya juga akan menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi di daerah bersangkutan.

Latar belakang tersebut menarik minat penulis untuk menguji tentang “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kota Pekalongan Periode 2010-2019”.

B. Rumusan Masalah

Meningkatnya total PAD di Pekalongan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan Belanja Modal. Selain itu, alokasi Belanja Modal di Kota Pekalongan masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan jenis belanja daerah lainnya, padahal bertambahnya Belanja Modal juga akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah. Dari permasalahan tersebut dapat ditarik pertanyaan:

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh secara positif terhadap Belanja Modal?
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh secara positif terhadap Belanja Modal?
3. Apakah Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah berpengaruh secara positif terhadap Belanja Modal?
4. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui apakah Pajak Daerah berpengaruh secara positif dan simultan terhadap Belanja Modal.
2. Guna mengetahui apakah Retribusi Daerah berpengaruh secara positif dan simultan terhadap Belanja Modal.
3. Guna mengetahui apakah Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah berpengaruh secara positif dan simultan terhadap Belanja Modal.

4. Guna mengetahui apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Tujuan operasional yakni guna mengetahui Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah Terhadap Belanja Modal.
2. Tujuan Fungsional semoga dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekalongan, Jawa Tengah sebagai referensi dasar dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakatnya.
3. Tujuan Individual yakni agar dapat memperluas wawasan, pengalaman, serta guna memenuhi tugas akhir (Skripsi) di IAIN Pekalongan.
4. Hasil penelitian ditujukan agar dapat menjadi referensi atau khasanah ilmu pengetahuan bagi pembaca khususnya untuk mahasiswa.

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri atas 5 bab utama dengan beberapa sub-bab pembahasan yang menggambarkan keseluruhan proses dan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis. Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi penjabaran latar belakang permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan dalam penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan berbagai teori, penelitian, serta hipotesis yang sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yang terbagi dalam sub-bab kajian teori, kerangka teori, kajian pustaka, dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan berbagai tahapan pengetahuan mengenai metode yang akan dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian. Terdiri atas sub-bab jenis penelitian, pendekatan penelitian, setting penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi penjabaran hasil olah data yang dilakukan peneliti beserta pembahasan untuk setiap hasil uji, yang mana terbagi menjadi sub-bab analisis dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan akhir, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uji penelitian dan pembahasan hasil yang dijabarkan peneliti pada bab sebelumnya terkait pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan dari laba perusahaan daerah terhadap belanja modal, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pajak daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal pada Kota Pekalongan periode 2010-2019. Dengan hasil $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,785 < 2,447$ dan $Sig. 0,124 > 0,05$, artinya setiap kenaikan atau penurunan pajak daerah belum tentu akan berpengaruh terhadap alokasi belanja modalnya.
2. Retribusi daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal pada Kota Pekalongan periode 2010-2019. Dengan hasil $t_{hitung} < t_{tabel}$ yakni $0,089 < 2,447$ dan $Sig. 0,932 > 0,05$, maka setiap kenaikan atau penurunan retribusi daerah belum tentu akan berpengaruh terhadap besaran alokasi belanja modalnya.
3. Pendapatan dari laba perusahaan daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal pada Kota Pekalongan periode 2010-2019. Dengan hasil $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,301 < 2,447$ dan $Sig. 0,241 > 0,05$, maknanya setiap kenaikan atau penurunan retribusi daerah belum tentu akan berpengaruh terhadap besaran alokasi belanja modalnya.

4. Pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan dari laba perusahaan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Kota Pekalongan periode 2010-2019. Dengan hasil F_{hitung} adalah 5,053 dan $Sig. = 0,044 < 0,05$, artinya semakin tinggi gabungan perolehan ketiga variabel diatas maka semakin tinggi pula alokasi belanja modal yang dikeluarkan, begitu pula sebaliknya.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Populasi penelitian masih terbatas hanya di Kota Pekalongan selama periode 2010-2019.
2. Peneliti hanya menggunakan 3 variabel bebas yakni pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan dari laba perusahaan daerah untuk diujikan terhadap belanja modal.
3. Data yang digunakan terbatas hanya berupa data sekunder tanpa disertai data primer berupa hasil wawancara ataupun pembagian.

C. Saran

1. Bagi pemerintah daerah Kota Pekalongan

Harapannya semoga hasil penelitian dapat menjadi evaluasi untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Pekalongan kedepannya. Diperlukan usaha yang lebih dari pemda guna meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah, terutama terkait perluasan cakupan wilayah pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan dari laba perusahaan daerah agar nantinya dapat terwujud suatu daerah yang sejahtera dan mandiri.

2. Bagi masyarakat

Diharapkan masyarakat harus selalu turut serta mengawasi jalannya pemerintahan yang ada di setiap daerahnya masing-masing, hal ini ditujukan agar terwujud kinerja pemda yang maksimal. Disisi lain, peran aktif masyarakat juga diperlukan dalam mematuhi semua kebijakan yang ditetapkan daerah, terutama terkait pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diperlukan adanya penambahan variabel dalam menguji pengaruhnya terhadap belanja modal, apabila perlu maka dapat dilakukan pengujian dinilai dari aspek non keuangannya agar dapat menilai aspek apa saja yang dapat mempengaruhi belanja modal. Selain itu, diperlukan adanya cakupan wilayah penelitian atau pemilihan sampel populasi yang lebih luas supaya hasil penelitian selanjutnya dapat lebih representative.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, D. M. (2018) 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Modal di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2014-2015', *Universitas Nusantara PGRI Kediri*, p. 18.
- Antika, I. J. (2017) 'Analisis Kontribusi BUMD Terhadap Peningkatan PAD Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Tahun 2006-2015', *Skripsi Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam UIN RADEN INTAN LAMPUNG*, pp. 1-121.
- Arini, P. R. and Kusuma, M. W. (2019) 'Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Investasi Swasta Di Indonesia Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening', *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 5(1), p. 28. doi: 10.26486/jramb.v5i1.611.
- Ariyanti, R., Setiawan, S. and Cahyati, N. (2020) 'Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kabupaten pekalongan', *Politeknik Pusmanu*, XVII(1), pp. 1-56.
- BPHN. (2013). Analisis dan Evaluasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah. *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI*, 1-90.
- Fatmasari (2016) 'Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Dana Bagi Hasil(DBH), Dana Alokasi Umum(DAU) dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Seluruh Kabupaten Kota di Provins', *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji*

Tanjungpinang, pp. 1–32.

Halim, Abdul. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.

Hartiningsih, N. and Halim, E. H. (2015) ‘Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di provinsi riau’, VII(2), pp. 258–269.

Hasbullah, R. N. (2017) ‘Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Periode 2012-2014)’, *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1(1). doi: 10.24176/agj.v1i1.3321.

Hidayat, F. N. and Pahlevi, D. R. (2016) ‘Analisis Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Daerah di Kabupaten Pekalongan Tahun 2010-2014’, *Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang 2STIE*, 5(2), pp. 123–136.

Intani, R. (2018) ‘Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016’, *Universitas Negeri Yogyakarta*, 1, pp. 1–164.

Juniawan, M. A. and Suryantini, N. P. S. (2018) ‘Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali’, *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(3), p. 1255. doi: 10.24843/ejmunud.2018.v7.i03.p05.

Kawedar, Warsito; Rohman, Abdul; Handayani, Sri. (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan*

Daerah. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Kemenkeu (2011) *KLASIFIKASI JENIS BELANJA*, *kemenkeu.co.id*. Available at:

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2011/101~PMK.02~2011PerLamp>

III.htm (Accessed: 18 October 2020).

Kusuma, D. P. *et al.* (2019) ‘Apbn 2019’, *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 13(1), pp. 85–92.

Mauri, A. P., Mattalatta and Hasmin (2017) ‘Analysis of the Effect Local Retribution and Local Tax Income to Increase Local Revenue (Study on Soppeng Regency) PAD Kab . Soppeng’, *STIE Amkop Makassar*, 2, pp. 1–19.

Meilya, R., Akram and Herwanti, T. (2018) ‘Fiscal Illusion and Defining Factors of Capital Expenditure (Study on Undeveloped Areas in West Nusa Tenggara)’, *International Review of Management and Marketing*, 8(1), pp. 98–106.

Mundiroh, S. (2019) ‘Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah’, *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(1), p. 104. doi: 10.32493/jabi.v2i1.y2019.p104-122.

Nuarisa, S. A. (2013) *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, Universitas Negeri Semarang. doi: 10.22437/jaku.v4i4.8445.

Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori dan Praktik : Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta; Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Nurmiati, Diana, F. and Murbayani (2019) 'Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar', *Fakultas Ekonomi Universitas Patria Artha*, pp. 1–12.
- Nurzen, M. and Riharjo, I. B. (2016) 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah', *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 12(1), pp. 88–99.
- Nurul Huda dkk. (2012). *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teori dan Sejarah*. Jakarta: Kencana.
- Oni Sahroni. (2015). *Maqashid Bisnis dan Keuangan Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- M.Umer Chapra. (2001). *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (terj). Ikhwab Abidin, *The Future of Economics : An Islam Perspective*, Jakarta: Gema Insani Pers.
- Priambudi, W. (2017) 'Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013', *Jurnal Nominal*, VI(1), pp. 136–147.
- Prof. Indra Bastian, P. D. (2019) 'Lingkup Akuntansi Sektor Publik', *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*, pp. 1–52.
- Riadi, M. (2020) *Belanja Modal (Pengertian, Kriteria, Jenis dan Kebijakan) - KajianPustaka.com*, *kajianpustaka.com*. Available at: <https://www.kajianpustaka.com/2020/11/belanja-modal.html> (Accessed: 3 December 2020).
- Santosa, P. B. dan E. P. L. (2008) 'Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara',

Badan Analisa Fiskal, 4(Dd), pp. 1–111.

Shofian, M. A., Yasin, M. and Fitriyah, N. (2017) ‘Determinants of Capital Expenditures and the Implications on the Quality of Government Financial Statements in Southeast West Nusa’, *International Conference and Call for Papers, Jember*, pp. 1133–1159.

Suharyadi, D., Martiwi, R. and Karlina, E. (2018) ‘Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor’, 5(2), pp. 7–8.

Suparyanto, Yudi (2019). *Otonomi Daerah Dalam Kerangka NKRI*. Klaten : Cempaka Putih.